

## **BAB III**

### **KONTRIBUSI RAMPOE UGM TERHADAP DIPLOMASI KEBUDAYAAN INDONESIA SERTA DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DENGAN MALAYSIA, TAIWAN, DAN CEKO**

Bab ini berisi tentang kerjasama dan dinamika hubungan Internasional Indonesia dengan Malaysia, Taiwan, dan Ceko yang merupakan negara sasaran diplomasi kebudayaan Rampo UGM tahun 2016. Penulis uraikan sejarah terbentuknya hubungan, pasang surut, serta bagaimana pengaruh aktor-aktor no- negara dapat mempererat kerjasama hubungan bilateral antara Indonesia dengan ketiga negara sasaran dan terakhir penulis akan uraikan kontribusi Rampo UGM terhadap Diplomasi Kebudayaan Indonesia. Tujuannya agar pembaca tahu bahwa aktor-aktor non-negara juga mempunyai peranan penting dalam menjalin hubungan Internasional untuk mendapatkan dukungan publik di luar negeri terutama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta isu aktual dan strategis sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No.2 tahun 2016 tentang Diplomasi Publik (Kemlu, Struktur Kementerian Luar Negeri).

Kerjasama merupakan hal yang dianggap penting dalam menjalin hubungan Internasional. Kerjasama dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam mencapai kesejahteraan warga negaranya serta untuk esistensi di dunia Internasional. Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa aspek seperti ekonomi, politik, pendidikan, maupun kebudayaan. Dengan adanya hubungan bilateral, masing-masing negara bisa saling membantu terutama untuk mendapat kepentingan nasionalnya serta menerima timbal balik dari

keduanya. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun demikian, Indonesia tetap tidak bisa jika harus berdiri tanpa melakukan kerjasama dengan negara lain. Bagaimanapun juga hubungan bilateral akan dibutuhkan terutama untuk membangun hubungan baik, membangun dan memelihara citra Indonesia di luar negeri dan lain sebagainya. Dibawah ini merupakan dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Taiwan, dan Indonesia dengan Ceko dalam hal kerjasama, pasang surut hubungan bilateral serta bagaimana pengaruh aktor – aktor non-negara dapat mempererat kerjasama hubungan bilateral antara Indonesia dengan ketiga negara sasaran Diplomasi Kebudayaan Rampoe UGM tahun 2016:

## **A. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia dengan Malaysia, Taiwan, dan Ceko**

### **A. 1. Hubungan Bilateral Indonesia dengan Malaysia**

Secara resmi Indonesia menjalin hubungan dengan Malaysia setelah Malaysia mengalami kemerdekaan dari Inggris pada 31 Agustus 1957. Akan tetapi, hubungan kedua negara ini sudah berjalan secara informal jauh sebelumnya karena persamaan ras rumpun Melayu (Sunarti, 1966). Hubungan Indonesia dan Malaysia beberapa kali mengalami pasang surut. Malaysia merupakan negara yang dapat dikatakan serumpun dengan Indonesia dan potensi kerjasama antar dua negara tersebut cukup besar. Meskipun demikian sering terjadi ketegangan antara kedua negara tersebut.

Dalam perjalanannya, kedua negara mengalami berbagai masalah, dan tidak jarang mengalami ketegangan politik. Puncak dari awal konflik hubungan Indonesia dengan Malaysia adalah meletusnya konfrontasi pada 1963, yaitu pembentukan federasi Malaysia pada 16 September 1963 yang dianggap sebagai titik tolak penting yang dipandang sebagai agenda barat untuk mengepung Indonesia. Konfrontasi

merupakan lembaran sejarah hitam yang harus dilalui kedua negara ketika perang dingin mencapai puncaknya. Konfrontasi berakhir ketika kepemimpinan presiden Soekarno beralih ke tangan presiden Soeharto. Dengan berakhirnya konfrontasi tidak sepenuhnya menjadikan hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia jauh dari permasalahan. bilateralisme kedua negara tersebut mengalami pasang surut. Begitu pula pada era pasca perang dingin, banyak masalah yang kemudian membawa hubungan kedua negara kembali memanas oleh isu-isu sensitive (Yakub, 2013).

Konflik yang sering terjadi akhir-akhir ini antara negara Indonesia dengan Malaysia berkaitan dengan wilayah kedaulatan masing – masing negara di daerah perbatasan. Isu bilateral perbatasan ini menyangkut kedaulatan pulau sipadan dan ligitan. Akhir dari persengketaan sipadan dan ligitan akhirnya jatuh kepada Malaysia berdasarkan keputusan ICJ pada Desember 2002. Setelah kejadian tersebut, bilateralisme kedua negara berada dalam titik stabil, namun pada tahun 2005 Malaysia mengklaim sebuah blok eksplorasi lepas pantai di laut Sulawesi dengan dasar kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan. Dengan adanya kasus ambalat hubungan kedua negara kembali menimbulkan permasalahan. Dalam kasus ambalat diperoleh kesepakatan untuk diselesaikan secara damai dalam kerangka antar negara melalui pembentukan tim teknis. Meski terdapat isu-isu mengenai persengketaan perbatasan, hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia banyak diwarnai dengan kerjasama meliputi berbagai bidang baik ekonomi, riset teknologi, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dan sebagainya.

Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Malaysia diadakan untuk memperkuat usaha bersama dalam rangka meredam kondisi yang “panas dingin” antara kedua negara tersebut. Dalam kerjasama perdagangan, Indonesia dengan Malaysia sudah terjalin selama era kepemimpinan SBY. Sebagai contoh pada konferensi pers yang berlangsung di

Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada tahun 2006 lalu, dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama PM Malaysia Abdullah Badawi menyepakati untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi khususnya antara Pertamina dan Petronas. Minyak kelapa sawit dan pengembangan sumber energi hasil olahan Kelapa Sawit juga menjadi pokok bahasan kedua petinggi Negara tersebut. Pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan perdagangan. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan, Presiden Joko Widodo mengutusnyanya untuk menemui Perdana Menteri Malaysia Najib Razak minggu. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas soal kerjasama minyak kelapa sawit. Dalam bidang minyak kelapa sawit, Indonesia dan Malaysia merupakan importir besar (CNN, Jokowi dan Rizal Ramli bahas kelapa sawit).

Malaysia merupakan negara yang paling banyak menampung TKI asal Indonesia. Dengan adanya WNI di negara tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan pribadi, para TKI juga diharapkan untuk bisa berkontribusi dan ikut menyejahterakan negara dimana ia bertempat tinggal. Catatan BNP2TKI menunjukkan bahwa jasa pengiriman uang atau remitansi TKI mampu menyumbang sekitar 10 persen nilai APBN. Jumlah tersebut menempati posisi kedua setelah pendapatan negara dari sektor minyak dan gas. Sumbangan TKI terhadap pendapatan negara tersebut menjadikan TKI dikenal sebagai “pahlawan devisa”. Selain meningkatkan devisa dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan, TKI yang bekerja di luar negeri dinilai penting untuk mengurangi angka pengangguran yang belum diserap oleh keterbatasan lapangan kerja di Indonesia (Lemhanas, 2013).

## **A. 2. Hubungan Bilateral Indonesia dengan Taiwan**

Indonesia secara resmi tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, namun hubungan Indonesia dengan Taiwan sudah terjalin sejak 1967. Kerjasama keduanya

berjalan dengan baik, terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan ketenagakerjaan (Tempo, 2016). Hubungan kedua negara diawali ketika pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menempatkan petugas Badan Koordinasi Intelejen (BAKIN) sebagai pemerintah Indonesia di Taipei. Pada tahun 1970, perwakilan ini kemudian diorganisasi secara resmi dengan membentuk Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Taipei yang beranggotakan petugas intelejen dari BAKIN dan petugas imigrasi dari Department Kehakiman. Sehubungan dengan perkembangan penanaman modal di Indonesia, tahun 1970 dibentuklah KADIN Taipei. Indonesia kemudian menempatkan pejabat bidang ekonomi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Department Perindustrian. Pemerintah Indonesia kemudian meningkatkan status KADIN Taiwan menjadi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan pada tanggal 7 juli 1994 dan secara resmi dibina dibawah naungan Department Perdagangan. Sebelumnya KADIN masih berada dibawah binaan BAKIN. Status KDEI adalah lembaga non-pemerintah yang bersifat ekonomi, namun melingkupi perdagangan dan imigrasi. KDEI juga bertugas melindungi kepentingan warga negara Indonesia yang berdomisili di Taiwan, yang mayoritas berstatus tenaga kerja ataupun mahasiswa/pelajar (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, 2014).

Indonesia mengakui Taiwan sebagai Republik Rakyat China (RRC) sejak tahun 1950 karena Indonesia mengadopsi *one china policy* (suryakusuma, 2012). Walaupun Indonesia dan Taiwan tidak menjalin hubungan diplomatik, tetapi hubungan Indonesia dan Taiwan cukup baik dan terus meningkatkan kerjasama di berbagai sektor terutama dari sisi perdagangan dimana Indonesia merupakan mitra dangang urutan ke-12 terbesar Taiwan pada tahun 2014 (Mediaindonesia, 2017).

*One China Policy* telah dijelaskan mengenai hubungan kedua negara tersebut hanya sebatas kegiatan ekonomi dan perdagangan. Tetapi berdasarkan fakta yang ada Indonesia dan Taiwan melakukan beberapa kerjasama selain kedua bidang tersebut, antara lain:

1. Kerjasama di bidang Pendidikan

Departemen Pendidikan Taiwan menyediakan beasiswa khususnya untuk siswa internasional berprestasi yang menuntut ilmu ke Taiwan untuk mendapatkan gelar sarjana, master atau PhD. Selain itu, setiap tahunnya Taiwan menyediakan beasiswa bahasa Mandarin untuk pelajar Indonesia yang tertarik untuk belajar bahasa Mandarin di Taiwan. Setiap tahunnya, Pemerintah Taiwan menyediakan sekitar 25 nama untuk beasiswa Taiwan dan beasiswa Bahasa Mandarin khususnya untuk para pelajar Indonesia baik itu yang di Taiwan maupun di Indonesia. Terhitung sejak tahun 2004, ada sekitar 100 pelajar Indonesia yang telah menerima beasiswa tersebut dan pergi untuk melanjutkan studinya di Taiwan. Selain itu, beberapa universitas yang ada di Taiwan menyediakan pendidikan, akomodasi, dan beragam beasiswa demi meningkatkan internasionalisasi dan untuk menarik banyak siswa internasional agar bisa melanjutkan studi di Taiwan. Pada tahun 2016, jumlah pelajar Indonesia di Taiwan mencapai 4.394 pelajar, termasuk 2.745 mahasiswa, 227 siswa pertukaran pelajar dan 1.442 siswa yang belajar bahasa Mandarin. Indonesia berada di urutan ke tiga sebagai jumlah mahasiswa asing yang belajar di Taiwan, setelah Malaysia dan Jepang. Para pelajar Indonesia di Taiwan mendirikan Perhimpunan Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan (*Indonesian Student Association*) yang berdiri pada bulan Mei 2010.

Menurut data statistik Departemen Pendidikan Taiwan, antara periode tahun 2000-2014 Taiwan dan Indonesia telah menandatangani 221 nota kesepakatan

kerjasama pendidikan antar universitas, yang menunjukkan semakin meningkatnya pertukaran kerjasama pendidikan antara kedua belah pihak di bidang pendidikan (Maulana, Roisah, & Susetyorini, 2016).

## 2. Kerjasama di bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Kerjasama pariwisata Indonesia dengan Taiwan tergolong baik. Hal ini didorong dengan adanya bebas visa bagi penduduk Taiwan untuk kunjungan wisata ke Indonesia Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, warga Taiwan bebas melakukan kunjungan ke Indonesia tanpa Visa. Pada bulan Februari 2016, Jumlah wisatawan Taiwan yang berkunjung ke Indonesia mencapai 16.789 orang, atau naik 34,98 persen dibanding bulan Januari 2016, namun turun 2,09 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Sementara, jumlah wisatawan Indonesia ke Taiwan pada bulan Februari 2016 mencapai 13.766 orang, atau turun 3,00 persen dibanding bulan Januari 2016 dan turun 8,74 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya (KDEI, perkembangan ketenagakerjaan). Hal itu berbeda dengan tahun 2013 dan 2014, jumlah wisatawan Taiwan ke Indonesia tahun 2015 mencapai 203.785 hal tersebut mengalami peningkatan 1,26% dibanding tahun sebelumnya (roc-taiwan, 2016). Jumlah tersebut lebih besar dibanding wisatawan Indonesia ke Taiwan Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh promosi pariwisata yang didorong dengan adanya fasilitas bebas visa bagi penduduk Taiwan yang ingin melakukan kunjungan wisata singkat di Indonesia.

Di bidang kebudayaan, Salah satu kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Taiwan ialah dengan cara saling mendatangkan kelompok seniman dari masing – masing negara. Pada tahun 2015 Taiwan mendatangkan kelompok

penari Tradisional Electric-Techno Neon Gods ke Indonesia untuk mempertunjukkan kebudayaan Taiwan sebagai upaya mempererat kerjasama budaya. Dengan adanya pertukaran budaya tersebut kedua negara berharap bahwa hal ini menjadi sarana untuk menjalin hubungan baik Indonesia dengan Taiwan (Siahaan, 2015). Selain itu, Upaya Indonesia dalam menjalin hubungan baik dengan Taiwan dengan menampilkan kesenian Indonesia kepada masyarakat Taiwan untuk di libatkan ke dalam kegiatan kebudayaan Internasional melalui sanggar-sanggar seni baik itu dari pelajar Indonesia di Taiwan maupun pelajar Indonesia yang dikirim ke Taiwan untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia.

Tahun 2016, Kementerian Pariwisata Indonesia menargetkan 275.000 wisatawan Taiwan berkunjung ke sejumlah objek wisata di Indonesia (Antara, 2016). Tentunya untuk mencapai target tersebut harus adanya upaya – upaya yang harus dilakukan. Upaya-upaya tersebut bisa melalui *stakeholders* untuk dilibatkan kedalam promosi baik itu pariwisata maupun kebudayaan.

### **A. 3. Hubungan Bilateral Indonesia dengan Ceko**

Hubungan Indonesia dengan Ceko sudah terjalin sejak pemerintahan Cekoslovakia. Hubungan tersebut dimulai ketika pemerintahan Cekoslavia mendirikan Konsul Kehormatan di Batavi pada tahun 1924 sedangkan pemerintah Indonesia mendirikan “*Indonesian Information Service*” di jalan Slezska 12, Praha 2 pada tahun 1948. Pemerintah Cekoslovakia mengakui Indonesia sebagai suatu Negara berdaulat pada 2 Februari 1950, Cekoslovakia membuka Konsulat Jenderal di Jakarta secara resmi pada 7 Maret 1950 dan dinaikkan statusnya menjadi Kedutaan Besar pada tahun 1957 (kemenlu).

Pada 31 Desember 1992 Cekoslovakia mengalami *disolution* atau pemisahan menjadi dua negara yaitu, Republik

Ceko dan Slovakia. Indonesia memberikan pengakuan kepada Republik Ceko yang berpisah secara damai dari Slovakia. Hubungan diplomatik RI-Ceko dibuka pada 1 Januari 1993. Hubungan politik antara Indonesia dan Ceko berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh sistem politik di Ceko yang terbuka dan kebijakan Indonesia yang lebih memperhatikan negara-negara di wilayah Eropa Tengah dan Timur.

Sejak terjadinya reformasi di Ceko, masalah politik tidak lagi menonjol dalam peningkatan hubungan diplomatik. Tetapi lebih kepada meningkatkan hubungan dagang dan pengenalan kembali Indonesia kepada pemerintahan Ceko yang baru. Dalam meningkatkan hubungan tersebut tentunya harus didorong dengan citra positif. Setelah perubahan politik di Ceko dari komunis ke demokratis terjadi pergantian elit secara total. elit yang baru di Ceko tidak belum mengenal Indonesia, dan kurang mengetahui sejarah hubungan Indonesia dan Republik Ceko dimasa lalu yang sangat baik. Itulah sebabnya para diplomat Indonesia terus memperkenalkan Indonesia ke Ceko, karena logikanya orang tidak akan beli barang dari suatu negara apabila orang tersebut tidak mengenal dekat negara itu. Jalan terbaik untuk memperkenalkan Indonesia adalah melalui diplomasi kebudayaan, Salah satunya dengan melibatkan sanggar – sanggar seni untuk memperkenalkan seni budaya Indonesia kepada dunia dalam rangka meningkatkan citra. Pada tahun 2010 salah satu sanggar seni Indonesia berhasil mengharumkan nama Indonesia lewat kesenian yang ditampilkan pada *International Folklore Festival* di Kota Sumperk, Ceko. Pemerintah Sumperk memberikan apresiasi kepada KBRI Ceko karena telah mengirimkan delegasinya untuk berpartisipasi di festival Sumperk karena membawa manfaat bagi masyarakat Internasional yang hadir di festival tersebut untuk lebih mengenal Indonesia. Kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan Indonesia khususnya kebudayaan kepada masyarakat Sumperk, Ceko, karena kegiatan *people to people contact* dapat menumbuhkan

citra positif Indonesia di Ceko yang tentunya akan berdampak positif pada hubungan luar negeri Indonesia Ceko (Nurwahyudi, 2010). Hal tersebut menjadi bukti bahwa peran aktor – aktor non negara juga mempunyai peranan penting dalam menjalin hubungan Internasional.

Kedua negara memiliki potensi yang besar untuk membina hubungan yang lebih erat. Dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Ceko, kedua negara melakukan kunjungan dari waktu ke waktu untuk mendiskusikan perkembangan bilateral kedua negara dan isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian kedua negara. Konsultasi bilateral antara menteri luar negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi dan menteri luar negeri Ceko, Lubomir Zaoralek di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2016. Pertemuan tersebut membahas perkembangan hubungan bilateral kedua negara, potensi pengembangan kerjasama di berbagai bidang, serta mendatangi perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas RI – Ceko serta *Memorandum of Understanding* (MoU) pembentukan konsultasi bilateral (Kemlu, 2016). Ceko merupakan salah satu dari 75 negara yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan untuk tujuan wisata ke Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No.104 tahun 2015. Fasilitas tersebut diyakini dapat mendorong peningkatan kontak antar pelaku usaha dan *direct trade* kedua negara serta jumlah kunjungan wisatawan asal Ceko ke Indonesia. Melalui Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas RI-Ceko, kedua negara dapat semakin mendorong *people-to-people contact* dan membuka peluang yang lebih luas untuk pengembangan dan peningkatan hubungan bilateral, dengan adanya kemudahan bagi para pemegang paspor dinas dan Diplomatik kedua negara melakukan kunjungan kerja/dinas. Melalui MoU pembentukan konsultasi bilateral kedua negara dapat secara regular *me-review* pelaksanaan kerja sama bilateral. Sehingga peluang atau potensi yang dimiliki kedua negara dapat dioptimalkan untuk mendorong kerjasama di

berbagai bidang. Pada awal tahun 2016 Indonesia dan Ceko berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama khususnya bidang ekonomi (Kompas, 2016).

Pertemuan bilateral kedua menteri luar negeri tersebut membahas 5 (lima) bidang kerja sama yang menjadi prioritas kedua negara. Bidang kerjasama tersebut ialah perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, dan *people to people contact*.

Bukti Pemerintah dalam mempromosikan *people to people contact* ialah ketika pemerintah melalui Menteri Sekretariat Negara dan Kementrian Pemuda dan Olahraga Indonesia memberikan dukungan dan apresiasi yang luar biasa dalam upaya mensukseskan kegiatan diplomasi kebudayaan Rampoe UGM 2016. Selain itu, diberlakukannya bebas visa oleh pemerintah Indonesia untuk keberangkatan diplomasi kebudayaan ke Ceko. Dukungan tersebut terjadi dikarenakan muatan atas misi diplomasi kebudayaan memang mewakili misi – misi yang sedang di bangun Pemerintah Indonesia.

## **B. Kontribusi Rampoe UGM terhadap Diplomasi Kebudayaan Indonesia Tahun 2016**

Misi kebudayaan yang dilakukan oleh Rampoe UGM tahun 2016 secara langsung memberikan kontribusi bagi Indonesia. Hal ini terbukti melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Rampoe UGM mendapat respon positif baik itu dari masyarakat negara sasaran, maupun masyarakat negara lain.

Pertemuan Rampoe UGM dengan KDEI Taipei pada 18 oktober 2016 membahas hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Taiwan sekaligus memberikan informasi terkait kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan. Bapak Siswandi, wakil KDEI Taipei memberikan apresiasi kepada Tim Rampoe UGM dan mengatakan bahwa

kedatangan tim ke Taiwan untuk melaksanakan misi diplomasi kebudayaan sudah tepat dan sejalan dengan program KDEI Taipei terutama untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Hal ini terbukti ketika tim Rampoe UGM melakukan promosi pariwisata di Taiwan, banyak yang tertarik dan kagum terhadap pariwisata Indonesia. Menurut data, jumlah wisatawan Taiwan yang berkunjung ke Indonesia pada bulan Agustus 2016 mencapai 14.408 orang. Secara kumulatif, jumlah wisatawan Taiwan berkunjung ke Indonesia periode Januari – Agustus 2016 mencapai 118.875 orang, atau turun 6,29 % (Siaran Pers KDEI bulan November, 2016). Oleh karena itu, kedatangan Rampoe UGM untuk mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia di Taiwan dikatakan tepat karena pada saat itu perlu banyak diadakannya promosi budaya dan pariwisata untuk menggaet wisatawan Taiwan agar datang ke Indonesia.

Peningkatan citra juga dilakukan dengan diadakannya pertunjukan seni baik itu di Malaysia, Taiwan, dan Ceko. Dengan diadakannya pertunjukan seni tersebut, masyarakat negara sasaran mengerti bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki budaya dengan tingkat seni yang tinggi. Terciptanya suatu citra positif bagi Indonesia yang secara tidak langsung menaikkan *prestise* bangsa Indonesia di mata Internasional. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesan positif yang timbul dari penonton atau masyarakat negara sasaran. Salah satunya pada acara resepsi diplomatik sekaligus promosi kebudayaan di KBRI Praha mendapat kesan dari mitra KBRI Praha.

*“Only Indonesia can pull this kind of awesome reception, This is one reception like no other. Definitely beautiful”*

Selain itu, pada kegiatan kesenian di Taiwan, banyak masyarakat negara setempat dan delegasi dari negara lain yang kagum dan tertarik untuk mempelajari kesenian Indonesia. Salah satunya delegasi dari Jepang yang sengaja menghampiri

tim Rampoe UGM di *backstage* yang antusias ingin mempelajari kesenian Indonesia khususnya seni tari.

Gambar 4.9

Antusias delegasi Jepang mempelajari tari tradisional Indonesia



**Sumber** : Dokumentasi NIFF Rampoe UGM

Kesan dari negara lain juga diberikan oleh Elina Topalska, *Director Dance Formation* Sofistik-Jivo Bulgaria yang turut serta menyaksikan penampilan Rampoe UGM di salah satu distrik Tainan, mengatakan bahwa :

*“That was amazing performance..”*

Hal ini menunjukkan suksesnya Rampoe UGM melalui misi kebudayaan yang dibawa pada tahun 2016 sehingga akan memberikan kontribusi bagi Diplomasi Kebudayaan Indonesia.

Berdasarkan pemaparan dari bab 3 mengenai dinamika hubungan bilateral serta kontribusi Rampoe UGM terhadap diplomasi kebudayaan Indonesia pada tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dengan ketiga negara tersebut mempunyai potensi untuk mengembangkan

kerjasamanya di berbagai bidang baik itu ekonomi, politik, pendidikan dan kebudayaan ataupun yang lainnya. Peran aktor-aktor non-negara sangat dibutuhkan dalam membangun citra Indonesia di luar negeri sehingga akan berpengaruh terhadap hubungan Indonesia dengan ketiga negara tersebut dalam memperkuat kerjasama bilateral.